

**ANALISIS *VALUE FOR MONEY*  
TERHADAP ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA  
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET  
PEMERINTAH KOTA PADANG**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan  
pada Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Pemerintahan

Oleh :

**SYAMSURIZAL**  
**06096012**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2009**



No. Alumni Universitas

Syamsurizal

No. Alumni Fakultas

a). Tempat/Tgl.lahir: Ujung Pandang, 31/08/1985 b). Nama Orang Tua: Ir. Darmawis Abdul Muis dan Fatimah Tahir. Fakultas: Politeknik d). Jurusan: Akuntansi Pemerintahan e) NBP: 06096012 f). Tgl.Lulus: 27 Agustus 2009 g) Predikat Lulus ..... h). IPK: ..... i) Lama Studi : 32 bulan k) Alamat orang tua: J Manggis I/91 Belimbing, Kecamatan Kuranji ,Padang

**Analisis Value For Money  
Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja Pada  
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Aset Pemerintah Kota Padang**  
Tugas Akhir DIV oleh Syamsurizal.  
Pembimbing 1.Andi Dwi Haryadi, SE. Ak. 2.Yossy Septriani, SE. M. Acc. Ak

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Value For Money* pada anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang. *Value for money* yang dimaksud adalah ekonomis, efisien dan efektif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara meminta data sekunder serta mewawancarai secara langsung pihak-pihak terkait yang ada pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk memberikan penjelasan yang memudahkan menginterpretasikan hasil analisis lebih lanjut. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan *Value for Money* pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Padang terhadap Anggaran Berbasis Kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan karena masih belum relevannya sumber daya manusia yang ada pada dinas terkait.

Tugas Akhir telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Agustus 2009  
Abstrak telah disetujui oleh penguji:  
Penguji:

Tanda Tangan	1	2	3	4
Nama Terang	Dedy Djefris, SE.M.Ak.Ak	Elfiri Santi, SE. M.Kom. Ak	Eliyanora, SE. M.Ak, Ak	Andi Dwi Haryadi, SE. Ak

Mengetahui:  
Ketua Jurusan Nurul Fauzi, SE, MM. Ak  
Nama



Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus:

Nomor Alumnus Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumnus Universitas	Nama	Tanda Tangan

## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintahan termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara.

Sejak dikeluarkannya undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang lebih dikenal dengan undang-undang Otonomi Daerah (yang telah direvisi menjadi undang-undang no. 32 tahun 2004) dan Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005), pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah harus mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Salah satu bentuk dari perubahan pengelolaan keuangan daerah yang tampak yaitu diterapkannya anggaran yang berbasis pada kinerja.

Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut di atas, maka membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien, efektif dan ekonomis (3E), terutama dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selama ini pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan tidak berdasarkan pencapaian atas target dan tujuan yang telah ditetapkan, namun lebih

menekankan pada bagaimana mengalokasikan atau menghabiskan anggaran yang telah ditetapkan. Sebelum terjadi reformasi pengelolaan anggaran daerah, pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah lebih ditujukan pada pemerintahan yang lebih tinggi, pengendalian dan audit keuangan belum berjalan dengan baik, proses penyusunan anggaran berdasarkan sistem tradisional menggunakan pendekatan *incremental* dan *line item* (pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan) dengan penekanan pertanggungjawaban pada setiap input yang dialokasikan.

Sementara itu pada saat sekarang pemerintah daerah diminta untuk menunjukkan pertanggungjawabannya kepada masyarakat melalui DPRD, penekanan pertanggungjawaban tidak hanya sekedar pada input saja tetapi juga pada output dan outcome, anggaran disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dan lebih menerapkan prinsip *Value for Money* dalam mengelola anggaran daerah (APBD).

Sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metoda tradisional atau *item line budget*. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggung jawabannya tidak diperiksa dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara ekonomis, efektif dan efisien atau tidak. Tolok ukur keberhasilan hanya ditunjukkan dengan adanya keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja namun jika anggaran tersebut defisit atau surplus berarti pelaksanaan

anggaran tersebut gagal. Dalam perkembangannya, muncullah sistematika anggaran kinerja yang diartikan sebagai suatu bentuk anggaran yang sumber-sumbernya dihubungkan dengan hasil dari pelayanan.

Anggaran kinerja mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan tujuan permintaan dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini. Dan yang ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus ekonomis, efisien dan efektif.

Berbeda dengan penganggaran dengan pendekatan tradisional, penganggaran dengan pendekatan kinerja ini disusun dengan orientasi output. Jadi, apabila kita menyusun anggaran dengan pendekatan kinerja, maka *mindset* kita harus fokus pada "*apa yang ingin dicapai*". Kalau fokus ke "*output*", berarti pemikiran tentang "*tujuan*" kegiatan harus sudah tercakup di setiap langkah ketika menyusun anggaran. Sistem ini menitikberatkan pada segi penatalaksanaan sehingga selain ekonomis, efisien, efektif penggunaan dana juga hasil kerjanya diperiksa. Jadi, tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah *performance* atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara ekonomis, efisien efektif. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan.

## BAB LIMA

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan selama semester I (satu) tahun 2009 telah berjalan dengan situasi dan kondisi yang ada, meskipun di dalamnya masih terdapat kekurangan-kekurangan.
- b. Dari beberapa kegiatan dan program yang telah berjalan selama 6 (enam) bulan pada tahun 2009 ada beberapa program yang hampir mencapai target dan ada pula yang belum dijalankan.
- c. Dalam menjalankan program-program yang ada, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang tidak begitu 100% menerapkan Value For Money. Hal ini dapat dilihat adanya perbandingan yang sangat besar antara standar harga barang dengan harga dalam pengadaan, lebih besarnya realisasi dibandingkan dengan input yang ada, serta tidak berjalannya program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan untuk semester I (satu) ini.

#### 5.2. Saran

- a. Sebaiknya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset pada kota Padang lebih serius lagi dalam melaksanakan anggaran berbasis kinerja dan memakai prinsip *Value For Money*, karena dalam peraturan dinyatakan dengan jelas bahwa setiap instansi pemerintah dituntut untuk melaksanakan anggaran berbasis kinerja guna memperbaiki kinerja pemerintah daerah maupun kinerja pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim dan Damayanti (2007). *Pengelolaan keuangan daerah*. Yogyakarta. Unit penerbit dan Percetakan STIM YPKN
- Halim, Abdul (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat
- Mahsun, Mohammad (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. BPFE
- Mardiasmo (2002). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta. CV. Andi Offset
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Penerapan Anggaran Terpadu Berbasis Kinerja Di Indonesia*. Jakarta
- Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang *Rencana Kerja Pemerintah*. Jakarta
- Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2004 tentang *Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga*. Jakarta
- Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Jakarta
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*. Jakarta
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*. Jakarta
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta